



PERAN INDONESIA SEBAGAI KETUA ASEAN 2023 DALAM MENJAGA STABILITAS ASIA TENGGARA

Bagas Alif Iskandar¹, Asep Setiawan²

¹⁾ Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

²⁾ Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
bagasiskandar5@gmail.com

Abstract

In 2023 Indonesia officially assumed the ASEAN Chairmanship under the theme “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” underscoring the importance of economic integration and strategic cooperation amid mounting global challenges. This article examines Indonesia's role as ASEAN Chair 2023 in maintaining Southeast Asian stability across three domains: economy, politics, and security. The study employs a qualitative method using library research and discourse analysis of secondary data drawn from official ASEAN and government documents, journal articles, and official press releases. The analytical framework combines foreign policy theory, diplomacy theory, role theory, and the regional security complex concept. The findings show that Indonesia successfully demonstrated its capacity as a regional leader. In the economic domain, Indonesia acted as a promoter through initiatives such as the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, the ASEAN Green Economy Framework, and the acceleration of the ASEAN Economic Community Blueprint 2025. In the political domain, Indonesia served as mediator in addressing the Myanmar crisis through implementation of the Five-Point Consensus and in advancing Timor-Leste's integration into ASEAN. In the security domain, Indonesia acted as facilitator through strengthening the ASEAN Political-Security Community, advancing the South China Sea Code of Conduct negotiations, and various confidence-building mechanisms. These three roles were carried out on the basis of Indonesia's free and active foreign policy principle, which provided strategic flexibility in bridging the diverse interests of ASEAN member states amid US-China geopolitical rivalry.

Article History

Submitted: 29 Juni 2026

Accepted: 8 Juli 2026

Published: 9 Juli 2026

Key Words

role; foreign policy; diplomacy; stability; ASEAN 2023.

Abstrak

Pada tahun 2023 Indonesia resmi menjabat sebagai Ketua ASEAN dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, yang menegaskan pentingnya integrasi ekonomi dan kerja sama strategis kawasan di tengah tantangan global. Artikel ini bertujuan mengkaji peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara pada tiga bidang: ekonomi, politik, dan keamanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research) serta analisis diskursus atas data sekunder berupa dokumen resmi ASEAN dan pemerintah, artikel jurnal, serta pemberitaan resmi. Kerangka analisis menggabungkan teori politik luar negeri, teori diplomasi, teori peran, dan konsep keamanan regional kompleks (regional security complex). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin kawasan. Di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai promotor melalui inisiatif seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement, ASEAN Green Economy Framework, dan percepatan ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Di bidang politik, Indonesia berperan sebagai mediator dalam penanganan krisis Myanmar melalui implementasi Five-Point Consensus serta dalam mendorong integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN. Di bidang keamanan, Indonesia berperan sebagai fasilitator melalui penguatan ASEAN Political-Security Community, negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan, dan berbagai mekanisme confidence building measures. Ketiga peran tersebut dijalankan berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang memberikan fleksibilitas strategis bagi Indonesia dalam menjembatani

Sejarah Artikel

Submitted: 29 Juni 2026

Accepted: 8 Juli 2026

Published: 9 Juli 2026

Kata Kunci

peran; politik luar negeri; diplomasi; stabilitas; ASEAN 2023



keragaman kepentingan negara-negara anggota ASEAN di tengah rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pendahuluan

Indonesia resmi menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 setelah menerima estafet kepemimpinan dari Kamboja, dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang menegaskan komitmen memperkuat integrasi ekonomi dan kerja sama strategis kawasan (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2023; Manullang, 2024). Rangkaian forum yang diselenggarakan sepanjang tahun—mulai dari kick off keketuaan di Bundaran Hotel Indonesia, KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo (6–11 Mei 2023), hingga KTT ke-43 ASEAN di Jakarta (4–7 September 2023) yang turut dihadiri Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov—menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menjembatani rivalitas kekuatan besar sekaligus menjaga sentralitas ASEAN (Kemenpan RB, 2023; Sekretariat Kabinet RI, 2023; Yahya, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 dari berbagai perspektif, antara lain melalui lensa konstruktivisme yang menyoroti peran Indonesia sebagai promotor perdamaian dan pembentuk identitas kawasan (Julina, 2023), potensi diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Myanmar (Ain & Wulandari, 2023), pragmatisme multilateral Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) di G20 dan ASEAN (Rosyidin, 2023), ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama kepentingan nasional Indonesia (Rafaldhanis, 2023), penguatan hubungan Indonesia–Tiongkok (Putri, 2024), serta relevansi kepemimpinan ASEAN dengan visi politik luar negeri Indonesia 2045 (Darwis & Wambrauw, 2023). Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu dimensi atau satu teori tunggal. Artikel ini melengkapi kajian yang ada dengan menganalisis peran Indonesia secara terintegrasi pada tiga bidang sekaligus—ekonomi, politik, dan keamanan—menggunakan kombinasi teori politik luar negeri, teori diplomasi, teori peran, dan konsep keamanan regional kompleks.

Secara teoretis, politik luar negeri dipahami sebagai strategi dan tindakan yang dirumuskan pengambil keputusan negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam interaksi dengan lingkungan eksternalnya (Holsti, 1972; Rosenau, 1974, 1980), yang di Indonesia diwujudkan melalui prinsip bebas aktif. Diplomasi, dalam pengertian Satow (1992), Morgenthau, dan Barston (1997), merupakan penerapan kecakapan dan taktik dalam menjalankan hubungan resmi antarnegara, yang di kawasan ASEAN banyak ditopang oleh diplomasi multilateral. Teori peran (Holsti, 1970; Walker, 1987; Wendt, 1999) menjelaskan bagaimana suatu negara memproyeksikan identitas dan kepentingan nasionalnya melalui peran yang diembannya—dalam hal ini promotor, mediator, dan fasilitator. Adapun konsep keamanan regional kompleks (Buzan, 1991; Buzan & Wæver, 2003) menekankan bahwa keamanan suatu kawasan bersifat interdependen, sehingga instabilitas di satu negara berpotensi menimbulkan efek limpahan (spillover) bagi kawasan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara di bidang ekonomi, politik, dan keamanan? Penelitian ini bertujuan menganalisis situasi kawasan pada masa keketuaan Indonesia, implementasi politik luar negeri bebas aktif dan diplomasi multilateral Indonesia, serta peran konkret Indonesia sebagai promotor ekonomi, mediator politik, dan fasilitator keamanan di Asia Tenggara.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dipandang tepat untuk memahami secara mendalam potensi dan strategi diplomatik Indonesia selama masa keketuaannya di ASEAN (Lamont, 2014; Boeije, 2009). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen resmi ASEAN dan pemerintah Indonesia, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga think tank, serta pemberitaan resmi yang dipublikasikan melalui kanal-kanal kredibel, yang dihimpun dari sumber daring maupun koleksi Perpustakaan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Analisis data dilakukan melalui analisis diskursus (discourse analysis), yakni pendekatan interpretatif-konstruktivis yang tidak sekadar memahami konteks tekstual, tetapi juga membaca asumsi-asumsi yang membentuk representasi peran Indonesia di ASEAN sepanjang tahun 2023 (Bakri, 2016; Moleong, 2010). Data yang telah dihimpun kemudian diorganisasikan berdasarkan tiga tema utama—ekonomi, politik, dan keamanan—sebelum dianalisis menggunakan kerangka teoretis yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

Hasil dan Pembahasan

ASEAN dan Konteks Regional pada Tahun 2023

ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri, termasuk Indonesia, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan stabilitas kawasan (Dam & Riswandi, 1995). Keanggotaan ASEAN kemudian berkembang menjadi sepuluh negara, sementara status keanggotaan Timor Leste—yang mengajukan aplikasi sejak 2011—masih dalam proses pembahasan hingga awal keketuaan Indonesia pada 2023.

Ketika Indonesia mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada awal 2023, kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan multidimensional. Dari sisi ekonomi, pemulihan pascapandemi COVID-19 berlangsung tidak merata antarnegara anggota, dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan Laos, Kamboja, dan Myanmar (Asian Development Bank, 2023). Dari sisi politik, krisis Myanmar pascakudeta militer Februari 2021 menjadi ujian besar bagi efektivitas Five-Point Consensus yang implementasinya berjalan minim (Crisis Group, 2023). Dari sisi geopolitik, rivalitas strategis Amerika Serikat–Tiongkok turut mewarnai dinamika Laut China Selatan, di mana negosiasi Code of Conduct dengan Tiongkok berjalan lambat meski telah disepakati sejak lama (CSIS, 2023). Kompleksitas ini diperparah oleh ancaman keamanan non-tradisional—kejahatan lintas batas, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi (ASEAN Secretariat, 2023; UNESCAP, 2023). Di sisi lain, kawasan ini memiliki modal besar untuk tumbuh: populasi lebih dari 650 juta jiwa dan proyeksi ekonomi digital senilai 1 triliun dolar AS pada 2030 (Kementerian Luar Negeri RI, 2023).

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia di Asia Tenggara

Politik luar negeri bebas aktif, yang berlandaskan Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan dan diterapkan secara konsisten sepanjang keketuaan ASEAN 2023 (Sabir, 1987). Prinsip “sejuta teman, nol musuh” yang digagas Presiden Joko Widodo memungkinkan Indonesia membangun kemitraan luas tanpa berpihak pada blok kekuatan tertentu (Setneg RI, 2024). Dokumen perencanaan strategis nasional—Background Study RPJMN III 2015–2019 dan RPJPN 2005–2025—menegaskan orientasi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) yang secara selektif memprioritaskan kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan penguatan kelembagaan regional dan multilateralisme global (Bappenas, 2015).



Penerapan konkretnya tampak pada pendekatan Indonesia terhadap krisis Myanmar, yang menekankan prinsip non-intervensi sekaligus mendorong dialog inklusif tanpa memihak, melalui keterlibatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan berbagai pihak yang bertikai. Dalam isu Laut China Selatan, Indonesia mendorong penyelesaian berbasis hukum internasional (UNCLOS 1982) tanpa memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan Tiongkok. Politik luar negeri bebas aktif juga tercermin pada diplomasi kesehatan—inisiasi ACPHEED pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN di Bali (Mei 2023)—dan diplomasi konektivitas melalui percepatan Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 (Kemenkes RI, 2023; Kemenhub RI, 2023). Dengan kerangka adaptif-reaktif Rosenau (1980), Indonesia berhasil menjembatani perbedaan pendekatan antara negara-negara yang lebih tegas terhadap Myanmar (Malaysia, Singapura, Filipina) dan negara-negara yang menekankan non-intervensi (Vietnam, Laos, Kamboja), tanpa mengorbankan kemitraan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang (Anwar, 2023).

Diplomasi Multilateral Indonesia di Asia Tenggara

Sebagai anggota pendiri ASEAN, Indonesia memanfaatkan kredibilitas historisnya untuk menjalankan diplomasi multilateral melalui penyelenggaraan dua KTT dan serangkaian pertemuan tingkat menteri sepanjang 2023. KTT ke-42 di Labuan Bajo menghasilkan Deklarasi Labuan Bajo yang menegaskan komitmen penguatan kerja sama ekonomi dan keamanan kawasan (Tim Komunikasi KTT ASEAN 2023, 2023), sementara KTT ke-43 di Jakarta menggali konsensus mengenai visi Indo-Pasifik, integrasi ekonomi digital, dan percepatan Visi Masyarakat ASEAN 2025, termasuk penguatan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) (Kementerian Pertahanan RI, 2023).

Dalam kerangka ASEAN Plus Three, Indonesia mendorong pembentukan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) untuk ketahanan pangan regional serta kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik (Kemendagri RI, 2023). Selain forum resmi, Indonesia mengoptimalkan diplomasi jalur dua melalui Jakarta ASEAN Forum (April 2023) yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil (Kemlu RI, 2023). Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF), Indonesia turut mempromosikan konsep “we feeling” guna memperkuat solidaritas dan identitas bersama ASEAN (Dewanto et al., 2024), yang diwujudkan antara lain melalui proposal bersama nominasi kebaya ke UNESCO, dukungan program pelatihan aparat sipil bagi Timor Leste, serta penyelenggaraan Komite ASEAN tentang Perempuan (ACW) di Yogyakarta.

Peran Indonesia sebagai Promotor di Bidang Ekonomi

Sejalan dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia memerankan diri sebagai promotor ekonomi kawasan melalui serangkaian inisiatif konkret. Pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 di Semarang (Agustus 2023), Indonesia mengusulkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang mencakup infrastruktur digital, pengembangan keterampilan, dan harmonisasi regulasi e-commerce (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia mendorong percepatan implementasi ASEAN Economic Community Blueprint 2025 dan penguatan rantai pasok regional melalui ASEAN Supply Chain Resilience Initiative (ASEAN Secretariat, 2015).

Di bidang keberlanjutan, Indonesia menginisiasi ASEAN Green Economy Framework yang mencakup energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan pembiayaan hijau (Gunawan, 2023). Dalam konteks pemulihan pascapandemi, Indonesia mendorong ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Plus dengan penekanan pada UMKM dan kelompok rentan, serta ASEAN SME Digitalization Roadmap yang diadopsi pada ASEAN SME Ministerial Meeting di Bandung (Juli 2023) (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Indonesia turut



berperan aktif mendorong ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta menginisiasi ASEAN Creative Economy Framework pada forum di Yogyakarta (Juni 2023) dan ASEAN Investment Facilitation Framework di Jakarta (Oktober 2023) (BKPM, 2023). Secara keseluruhan, peran promotor ini menegaskan bahwa interdependensi ekonomi menjadi salah satu pilar penting stabilitas kawasan sebagaimana ditekankan dalam konsep keamanan regional kompleks.

Peran Indonesia sebagai Mediator di Bidang Politik

Penyelesaian Krisis Myanmar

Ditinjau dari perspektif keamanan regional kompleks, instabilitas politik Myanmar berpotensi menimbulkan efek limpahan berupa arus pengungsi dan kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas kawasan (Buzan & Wæver, 2003). Sebagai mediator, Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi Five-Point Consensus yang disepakati pada April 2021, lalu menempuh konsultasi intensif dengan junta militer (State Administration Council), National Unity Government, dan kelompok etnopolitik melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Aji & Ningsih, 2023). Indonesia memperkuat mandat Special Envoy dengan menunjuk dua utusan—untuk aspek politik dan aspek kemanusiaan—guna memberi perhatian yang seimbang pada kedua dimensi krisis (Isjchwansyah, 2023).

Pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Retreat on Myanmar di Bangkok (Juli 2023) menghasilkan “Concerted Implementation Plan for the Five-Point Consensus” yang memuat langkah dan indikator capaian yang lebih terukur. Indonesia juga membentuk ASEAN Humanitarian Assistance Task Force for Myanmar untuk mengoordinasikan bantuan melalui AHA Centre, memfasilitasi dialog informal di Jakarta (Agustus 2023) yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan Myanmar, serta berkoordinasi dengan negara tetangga Myanmar dan dengan PBB (United Nations, 2023). Pada akhir masa keketuaannya, Indonesia berhasil mendorong disepakatinya “ASEAN Roadmap for Myanmar Crisis Resolution” serta “Jakarta Declaration on the Situation in Myanmar” yang memperpanjang mandat ASEAN Troika hingga keketuaan Laos pada 2024—capaian yang meskipun terbatas akibat resistensi junta militer, tetap menjadi warisan penting bagi kesinambungan mediasi ASEAN (Weatherbee, 2023).

Integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN

Sebagai negara yang berbatasan langsung dan memiliki sejarah hubungan kompleks dengan Timor Leste, Indonesia menempatkan integrasi Timor Leste sebagai prioritas politik melalui pendekatan yang dapat disebut sebagai “reconciliatory diplomacy”. Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia memfasilitasi adopsi “Roadmap for Timor-Leste's Full Membership to ASEAN” yang menetapkan tiga fase integrasi: observer plus (2022–2023), pengembangan kapasitas (2023–2025), dan keanggotaan penuh yang ditargetkan pada 2025 (ASEAN Secretariat, 2023).

Untuk mendukung implementasi roadmap tersebut, Indonesia membentuk ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor-Leste dan program peningkatan kapasitas institusional bagi pejabat Timor Leste. Selama 2023, Indonesia memfasilitasi partisipasi Timor Leste dalam sekitar 136 pertemuan ASEAN lintas pilar, termasuk ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit, sekaligus mendorong adopsi ASEAN Economic Integration Framework for Timor-Leste pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN di Semarang (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Indonesia turut memfasilitasi dukungan mitra dialog (Uni Eropa, Jepang, Australia), penyelesaian segmen batas darat melalui Joint Border Committee, serta perluasan Master Plan on ASEAN Connectivity dan kerja sama BIMP-EAGA untuk mencakup Timor Leste (Sahin, 2023). Proses ini mencapai puncaknya pada KTT ke-43 di Jakarta dengan



disepakatinya tahapan dan target waktu yang jelas bagi akses penuh Timor Leste, mencerminkan keberhasilan Indonesia menjembatani aspirasi Timor Leste dengan kekhawatiran sejumlah negara anggota ASEAN lainnya.

Peran Indonesia sebagai Fasilitator di Bidang Keamanan

Sebagai fasilitator keamanan, Indonesia memimpin evaluasi paruh waktu ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025 dan memfasilitasi penyusunan APSC Post-2025 Vision (ASEAN Secretariat, 2023). Di bidang maritim, Indonesia menyelenggarakan ASEAN Maritime Forum di Bali (Oktober 2023) dan memprakarsai ASEAN Maritime Security Initiative untuk memperkuat koordinasi lintas-agensi maritim (Kemenko Kemaritim RI, 2023). Dalam isu Laut China Selatan, meski bukan negara pengklaim, Indonesia memfasilitasi ASEAN-China Senior Officials' Meeting (SOM-DOC) di Jakarta (April 2023) yang mendorong kemajuan negosiasi Code of Conduct melalui pendekatan “dual-track diplomacy”, sekaligus memfasilitasi kesepakatan pedoman komunikasi hotline dalam merespons keadaan darurat maritim.

Di ranah keamanan non-tradisional, Indonesia mendorong implementasi ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime melalui AMMTC di Pontianak (September 2023) dan memprakarsai perluasan jejaring ASEANAPOL untuk mencakup kerja sama dengan INTERPOL (Kemendagri RI, 2023). Melalui ADMM-Plus, ARF, dan EAS, Indonesia memfasilitasi dialog dengan mitra eksternal berlandaskan prinsip “dynamic equilibrium” yang menolak konfrontasi maupun pembentukan blok keamanan eksklusif (Weatherbee, 2019). Berbagai forum confidence building measures turut diselenggarakan, antara lain ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting di Bali (Maret 2023) yang menghasilkan Bali Joint Declaration, serta Jakarta International Defence Dialogue (September 2023). Meskipun demikian, efektivitas peran fasilitator Indonesia tetap dibatasi oleh prinsip non-intervensi dan konsensus ASEAN, kesenjangan kapasitas antarnegara anggota, serta tekanan rivalitas strategis Amerika Serikat–Tiongkok yang terus menguji sentralitas ASEAN (Laksmiana & Supriyanto, 2023).

Kesimpulan

Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara menunjukkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan bidang ekonomi, politik, dan keamanan di bawah tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai promotor melalui inisiatif seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement, ASEAN Green Economy Framework, dan ASEAN Supply Chain Resilience Initiative yang memperkuat fondasi ekonomi kawasan sebagai prasyarat stabilitas jangka panjang. Di bidang politik, Indonesia berperan sebagai mediator dalam isu-isu sensitif—penanganan krisis Myanmar dan integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN—dan berhasil mencapai kemajuan meski dibatasi oleh prinsip non-intervensi ASEAN. Di bidang keamanan, Indonesia berperan sebagai fasilitator melalui revitalisasi ASEAN Political-Security Community, negosiasi Code of Conduct Laut China Selatan, dan berbagai mekanisme confidence building measures.

Ketiga peran tersebut dijalankan atas dasar prinsip politik luar negeri bebas aktif yang memberikan Indonesia fleksibilitas strategis untuk mengambil posisi seimbang di tengah rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan keragaman kepentingan negara anggota ASEAN. Keberhasilan Indonesia dapat diatribusikan pada tiga faktor: kapasitas diplomatik dalam membangun konsensus, pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan dimensi ekonomi-politik-keamanan, serta komitmen terhadap prinsip bebas aktif. Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan temporal yang hanya berfokus pada tahun 2023; penelitian selanjutnya



perlu mengeksplorasi keberlanjutan capaian tersebut di bawah keketuaan Laos pada 2024 serta melakukan kajian komparatif antarperiode keketuaan ASEAN untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika kepemimpinan regional di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Ain, W. N., & Wulandari, S. D. M. (2023). Ketetuaan ASEAN dan potensi diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar. *Jurnal Sentris*, 4(2), 146–161.
- Aji, C., & Ningsih, N. (2023). Strategi bagi ketetuaan Indonesia di ASEAN dalam mendorong pelaksanaan Five Point Consensus (5PC) pada konflik Myanmar. *JH*, 8(1), 48–70. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.5>
- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's ASEAN chairmanship: Balancing regional and global interests. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 209–236.
- ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023a). ASEAN Annual Report 2022–2023. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023b). ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Report 2023. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023c). Jakarta Declaration on the Situation in Myanmar. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023d). Roadmap for Timor-Leste's Full Membership to ASEAN. ASEAN Secretariat.
- Asian Development Bank. (2023). Asian Development Outlook 2023: Economic trends and prospects in developing Asia. ADB.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif berlandaskan kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas.
- Bakri, U. S. (2016). Metode penelitian hubungan internasional. Pustaka Pelajar.
- Barston, R. P. (1997). Modern diplomacy. Longman.
- Boeije, H. R. (2009). Analysis in qualitative research. Sage.
- BKPM. (2023). Outcomes of ASEAN Investment Forum 2023. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Buzan, B. (1991). People, state and fear. Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and powers: The structure of international security. Cambridge University Press.
- Crisis Group. (2023). Myanmar's deadlock: Breaking the cycle of violence (Asia Report No. 334). International Crisis Group.
- CSIS. (2023). Strategic assessment 2023: America's global competitions. Center for Strategic and International Studies.
- Dam, S., & Riswandi. (1995). Kerja sama ASEAN: Latar belakang, perkembangan, dan masa depan. Ghalia Indonesia.
- Darwis, D., & Wambrauw, M. S. (2023). Indonesia's foreign policy in the Indo-Pacific region in the 2023 ASEAN chair. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6(11).
- Dewanto, D., Saragih, D., & Harahap, M. (2024). The role of Indonesia in strengthening the concept of 'we feeling' and ASEAN identity in the 2023 ASEAN chairmanship. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(2), 1061–1065. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i02-24>
- Gunawan, D. I. (2023). Inovasi ekonomi hijau dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Perpustakaan Lemhannas RI.



- Holsti, K. J. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.
- Holsti, K. J. (1972). *International politics: A framework for analysis*. Prentice Hall.
- Isjchwansyah, R. Y. (2023). Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar dari Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 91–101. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1972>
- Julina, S. (2023). Peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023: Perspektif konstruktivisme. *Jurnal Alternatif–Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(2), 51.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Hasil pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN 2023. Kemenkes.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. (2023). Laporan pelaksanaan ASEAN Maritime Forum. Kemenko Marves.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2023). KTT ke-26 ASEAN Plus Three (APT) sepakati kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik kawasan (Siaran Pers No. HM.4.6/336/SET.M.EKON.3/09/2023).
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Laporan pelaksanaan ASEAN SME Ministerial Meeting 2023. Kemenkop UKM.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2023). Indonesia dan ASEAN 2023: Epicentrum of Growth. Kemlu RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). Laporan ASEAN Defence Ministers Meeting 2023. Kemhan RI.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). Mendag siap pimpin Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55. *Tempo Nasional*.
- Kementerian Perhubungan RI. (2023). Laporan Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN 2023. Kemenhub RI.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2024). Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023: Keamanan laut sebagai kepentingan bersama. Setneg RI.
- Kemenko PMK. (2023). Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana siklon Mocha Myanmar. Kemenko PMK.
- Kemendagri RI. (2023). Laporan pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) 2023. Kemendagri RI.
- Laksmiana, E., & Supriyanto, R. (2023). Indonesia's regional leadership: Continuity and change in ASEAN. *S. Rajaratnam School of International Studies*.
- Lamont, C. (2014). *Research methods in international relations*. Sage.
- Manullang, A. J. (2024, 18 April). Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023: Keamanan laut sebagai kepentingan bersama. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putri, J. W. (2024). Indonesia and ASEAN chairmanship in 2023: Leading the region in strengthening relations with China. *International Journal of Law and Politics Studies*, 6(1), 96–106.
- Rafaldhanis, M. R. A. (2023). ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama Indonesia. *Jurnal Alternatif–Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1).
- Rosenau, J. N. (1974). *Comparing foreign policies: Theories, findings and methods*. John Wiley and Sons.
- Rosenau, J. N. (1980). *The scientific study of foreign policy*. The Free Press.
- Rosyidin, M. (2023). Pragmatisme multilateral dalam momen keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022–2023. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(2), 131–152.
- Sabir, M. (1987). *Politik bebas aktif*. Haji Masagung.



- Sahin, S. B. (2023). Indonesia's strategic engagement with Timor-Leste: Beyond bilateral relations. *Journal of Contemporary Asia*, 53(3), 421–445.
- Satow, E. (1992). *A guide to diplomatic practice*. Longman Green.
- Sebastian, L. C., & Syailendra, E. A. (2023). Indonesia's ASEAN chairmanship 2023: Challenges and opportunities. ISEAS Yusof Ishak Institute.
- Sekretariat Kabinet RI. (2023). *Inilah agenda KTT ke-43 ASEAN 2023 Jakarta*. Setkab RI.
- UNESCAP. (2023). *Economic and social survey of Asia and the Pacific 2023: Building forward fairer*. United Nations ESCAP.
- United Nations. (2023). *ASEAN-UN Ministerial Meeting joint statement on Myanmar*. United Nations.
- Walker, S. G. (1987). *Role theory and foreign policy analysis*. Duke University Press.
- Weatherbee, D. E. (2019). *ASEAN's half century: A political history of the Association of Southeast Asian Nations*. Rowman & Littlefield.
- Weatherbee, D. E. (2023). Indonesia and the Myanmar crisis: The limits of ASEAN diplomacy. *Contemporary Southeast Asia*, 45(3), 342–368.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Yahya, F. (2023). *Pesan dan peran diplomasi Indonesia di KTT ASEAN ke-43*. Detiknews.